



Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam

Analysis Of Policy Implementation Waste Management at Kecamatan Bengkong Kota Batam

Muhammad Citra Husada Batubara*, Lisman Manurung, Made Yudhi Setiani

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka,
Indonesia

*E-mail: husada.bumilaut@gmail.com

Abstrak

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan kota terbesar ke tiga populasinya di Sumatera setelah Medan dan Palembang. Jumlah penduduk pada Tahun 2019 mencapai 1.349.775 jiwa. Penyelenggaraan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, upaya menanggulangi kemacetan dan sejumlah pelayanan lainnya, merupakan pelayanan publik yang dibutuhkan penduduk. Untuk itu Pemerintahan Kota Batam telah membuat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan dalam penelitian dianalisis dengan metoda analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum optimal. Pemerintah Kota dalam hal ini Kecamatan Bengkong dalam mengimplementasikan kebijakan belum berhasil membuat warga untuk memahami implementasi atau pelaksanaan 3R (reuse, reduce, recycle) yaitu menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan informasi yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat agar pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong. Pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

Kata Kunci: analisis kebijakan, pengelolaan sampah

Abstract

Batam City is the largest city in Riau Islands Province and is the third largest city population in Sumatra after Medan and Palembang, with a population of 2019 reaching 1,349,775 people. In a number of sectors, such as providing education, improving health services, improving waste management services, efforts to tackle congestion and a number of other services, the Batam City Government has rolled out Batam City Regulation Number 11 of 2013 Waste Management. The local government has been implementing the waste management policy from the beginning purpose of this study was to analyze the implementation of waste management in Bengkong District, Batam City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, because the data generated in this study are written and oral words with descriptive methods are the methods used to analyze data by describing or describing. The results of the study showed that in general, the implementation of waste management policy in the Bengkong District of Batam City was still not optimally carried out by the Bengkong District in implementing policies, where the community in the Bengkong District of Batam City did not understand the implementation or implementation of 3R (reuse, reduce, recycle) reuse, reduce and recycle. The government also needs to provide information that is relevant and easily accepted by the public in order to understand the implementation of government policies that are useful for improving overall community welfare in Batam City, especially in Bengkong District. The implementation of the policy requires good socialization to the community.

Keywords: policy analysis, waste management.

Cara citasi : Batubara, Muhammad Citra Husada. Manurung, Lisman. & Setiani, Made Yudhi (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 1 No 2 September 2020, 71-81.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar di dunia setelah negara China, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang tercatat oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2015 sebanyak 238.518.000 jiwa di Indonesia, dimana diperkirakan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 273.523.615 jiwa. Adapun jumlah penduduk perkotaan di Indonesia kini mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2019 telah mencapai 51%. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan membuat tingginya permintaan layanan publik.

Kota Batam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam tiga dekade terakhir ini. Kota Batam merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, yakni saat ini berpenduduk kurang lebih 1.349.775 jiwa, yang mendiami wilayah seluas 1,595 km². Kota Batam yang merupakan kota industri sekaligus menjadi pusat aktivitas bisnis dan industri terkemuka di Indonesia. Pertumbuhan di berbagai sektor jauh lebih pesat di wilayah Kota Batam dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Dihat dari kondisi geografis Kota Batam merupakan kota pada suatu pulau. Apabila pemerintah tidak serius dalam penanganan pengelolaan sampah di Kota Batam akan menimbulkan permasalahan, banyak masalah perkotaan lainya terutama masalah tempat pembuangan sampah. Oleh sebab itu pemerintah harus bekerja keras dan bahu membahu dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah Kota Batam kedepanya secara bersama-sama dengan stakeholder dan masyarakat.

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip a. keterpaduan, b. akuntabilitas, c. transparansi, d. efisiensi, e. efektifitas; dan kepastian hukum.

Secara kelembagaan, pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah, baik pusat dan daerah. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pengelolaan sampah akan menjadi tanggung-jawab para pemimpin pemerintahan. Namun demikian, karena sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia, maka dinamika kehidupan warga kota sebagai manusia biasa sangat mempengaruhi berbagai implementasi kebijakan

pelayanan di bidang persampahan. Oleh sebab itu, dimensi dinamika warga sebagai pihak yang memperoleh pelayanan dari pemerintah dalam hal pengelolaan sampah menjadi hal penting untuk diperhatikan. Pengelolaan sampah di Kota Batam acap kali dijadikan sebuah permasalahan yang tak bisa kunjung selesai diatasi oleh pemerintah Kota Batam itu sendiri. Karena dinilai sering mengalami kerusakan dan tidak menyediakan peralatan yang memadai sehingga mengakibatkan pengambilan sampah di perumahan menjadi terhambat. Namun tidak semua permasalahan sampah diakibatkan oleh kurangnya keseriusan pemerintah untuk mengelola sampah, akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, pendidikan, pendapatan, kepedulian terhadap sampah, peraturan, kondisi lingkungan dan fasilitas turut berpengaruh.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivisme dengan metode kualitatif. Munculnya gugatan terhadap positivisme di mulai tahun 1970-1980an. Pemikirannya dinamai "post-positivisme". Tokohnya; Karl R. Popper, Thomas Kuhn, para filsuf mazhab Frankfurt (Feyerabend, Richard Rotry). Post positivisme, merupakan pemikiran bahwa tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam. Tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang absolut, sebab manusia selalu berubah. Post-positivisme merupakan perbaikan positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan, dan dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologis aliran post-positivisme bersifat critical realism dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam tapi mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti.

Secara epistemologis: Modified dualist/objectivist, hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan tapi harus interaktif dengan subjektivitas seminimal mungkin. Observasi bisa saja dipengaruhi oleh persepsi masing-masing orang. Proses dari positivisme ke post-positivisme telah melalui kritikan dari tiga hal yaitu : a. Observasi sebagai unsur utama metode penelitian. b. Hubungan yang kaku antara teori dan bukti. Pengamat memiliki sudut pandang yang berbeda dan teori harus mengalah pada perbedaan waktu. c. Tradisi keilmuan yang terus berkembang dan dinamis (Salim, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di Kota Batam menghadapi permasalahan manajemen dalam pengelolaannya. Tahun 2000 dimana awal pembentukan Kota Batam yang sebelumnya berstatus Kota administratif Batam dan belum terbentuk DPRD. Kota Batam masih berstatus dibawah pengelolaan oleh Otorita Batam. Dengan berjalannya waktu Kota Batam dengan pemerintah sendiri terbentuk namun Otorita Batam masih mempunyai peranan penting dalam tata kelola kawasan perdagangan bebas Batam.

Pada dasarnya tujuan dari dibentuknya Kota Batam merupakan bagian dari rancangan untuk mewujudkan sebuah kota alternatif atas Singapura. Namun seiring berjalannya waktu terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas antar dua badan di Kota Batam. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya dua badan pemerintahan yang mengurus Batam, yaitu Badan Otorita Batam sekarang merubah nama menjadi Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam. Pada akhirnya untuk mengatasi permasalahan dualisme kepemimpinan di Kota Batam pemerintah pusat membuat suatu kebijakan pada bulan September 2019, Badan Pengusaha Kawasan Batam (BP Batam), disatukan dengan pemerintah Kota Batam yang di pimpin oleh ex-Officio BP Batam yang dijabat oleh Walikota Batam, sekaligus memimpin BP Batam agar terjadi sinkronisasi setiap kebijakan yang ditetapkan.

Riant Nugroho (2011), mengatakan bahwa keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Kebijakan publik juga dihasilkan dari suatu sistem politik.

Dalam konteks negara demokratis, penyelenggara tugas baik pada badan-badan pemerintah maupun pejabat-pejabatnya dipilih menurut prinsip-prinsip demokratis. Lebih jauh, Harold Laswell & Abraham Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Miftah Thoha (2008:107) mengatakan bahwa: "... *policy as a projected program of goals, value, and practices*". Terkandung makna bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada hakikatnya mengandung tujuan-tujuan, nilai Oleh sebab itu setiap kebijakan publik yang ditetapkan harus melalui beberapa kajian dalam proses pembentukannya, agar kebijakan publik tersebut tepat sasaran.

Dalam konsep kebijakan publik ini dimana kebijakan tersebut berawal dari *policy output* (kebijakan keluar), *delivery* (menyampaikan kebijakan), *target group* (kelompok sasaran dalam kebijakan), *implikasi* (keterlibatan kelompok sasaran kebijakan) dan *policy outcome* (luaran kebijakan).

Penggunaan istilah implementasi mulai muncul kepermukaan beberapa dekade yang lalu. Istilah tersebut digunakan oleh Harold Laswell (1956) dalam Erwan Agus dan Dyah Ratih (2015:15) Laswell menggagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (*policy process approach*). Menurutnya agar ilmuan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahap-tahapan yaitu, agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Umumnya pelayanan yang sering tampak dimata publik adalah pelayanan yang diberikan para petugas pelayanan. Kualitas pelayanan memiliki arti yang tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi menyenangkan pelanggan, memberikan inovasi kepada pelanggan, dan membuat pelanggan menjadi kreatif.

Pada prinsipnya, konsep kualitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi produk dan dimensi hubungan antara produk dan pemakai. Dimensi produk memandang kualitas barang dan jasa dari perspektif derajat konformitas dengan spesifikasinya, yaitu perspektif yang memandang kualitas dari sosok yang dapat dilihat, kasat mata, dan dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan dan pengamatan.

Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen (*consumer behavior*), yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana nilai kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan suatu pelayanan publik. Pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan.

Konsep partisipasi masyarakat mengandung beberapa pengertian. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi pada hakikatnya ditandai oleh meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program tertentu. Partisipasi dapat berarti sebagai keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas keseharian manusia. Apriadi (1989) memberikan definisi mengenai sampah sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga maupun sebagai sisa proses industri. Hadiwiyoto (1983) memberikan ciri-ciri sampah sebagai bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya, dari segi sosial ekonomis sudah tidak memiliki harga, dan dari segi lingkungan merupakan bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Hadiwiyoto (1983) mendefinisikan sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagiannya utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian. Namun sampah sebenarnya mempunyai segi ekonomis apabila mampu mendaur ulang sampah yang ada menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual ekonomis bagi masyarakat.

Pembagian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dimana pada awalnya pengelolaan sampah daerah Kota Batam dibagi menjadi 3 zona. Pertama zona Batam Barat, Batam Timur dan Bareleng (Bagian Rempang dan Galang Pulau). Pada zona kedua untuk pengelolaan sampah pada tahun 2013-2016 dilakukan oleh pihak ketiga yaitu antara kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, namun setelah mengalami evaluasi pengelolaan sampah di Kota Batam, total Kecamatan di Kota Batam ada 12 Kecamatan, 9 Kecamatan ada di daratan Kota Batam dan 3 Kecamatan ada di luar daratan Kota Batam. Pada awal tahun 2017 sampai saat ini semua pengelolaan sampah setiap Kecamatan di Kota Batam

diambil alih oleh pihak Kecamatan, kecuali bagian kepulauan yang ada di Batam masih dikelola oleh pihak ketiga.

Pengalihan aktifitas ke level Kecamatan ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih dekat dengan lokasi. Artinya, dengan adanya pembagian wilayah pengelolaan menurut kecamatan, maka Camat dapat terlibat langsung di dalam mengawasi pelayanan publik di lokasi yang ditentukan. Namun pada pelaksanaannya masih mengalami kendala untuk tempat pembuangan sampah sementara yang ada di setiap Kecamatan. Pengalihan pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak Kecamatan juga sudah ada perubahan dalam pengelolaannya di bawah Kecamatan, dimana sampah rumah tangga bisa cepat dilakukan pengumpulannya. Armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai serta kesiapan dari pihak Kecamatan untuk mengontrol langsung setiap kegiatan yang dilakukan.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, pemerintah kota Batam membuat suatu kebijakan. Agar dapat mengatasi permasalahan sampah di kota Batam lebih jauh, merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah. Pemerintah mewacanakan adanya pengolahan sampah oleh pihak ketiga sesuai dengan yang tertera pada Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang 'Pengolahan Sampah'. Disitu dijelaskan 'Pemerintah melakukan reuse, reduce dan recycle..' Hal tersebut perlu dilakukan karena kota Batam merupakan wilayah kepulauan. Permasalah sampah perlu diatasi secara langsung dan cepat oleh pemerintah akan berdampak buruk bagi kota Batam itu sendiri karena keterbatasan lahan yang ada.

Proses pengelolaan sampah menurut standar penanganan modern, yaitu sistem pengelolaan sampah terpadu adalah sistem manajemen yang mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan pembangunan perkotaan, mempertimbangkan semua aspek terkait, seperti aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan institusi, politik, keuangan dan aspek teknis secara simultan, serta memberi peluang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Damanhuri, 2007).

Dalam mata rantai pengelolaan sampah yang berbasis dari 3R (*reuse, reduce dan recycle*) sampah dikumpulkan, dipilah dan kemudian didaur ulang. Artinya pemerintah kota Batam perlu melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan sampah sebagai peluang untuk masyarakat untuk menambah penghasilan ekonomis. Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah kota Batam juga sudah menerapkan konsep bank sampah di setiap Kecamatan untuk mengakomodir sampah-sampah yang mempunyai nilai jual sebelum dilakukan proses pembuangan sampah ke tempat akhir. Pemerintah kota Batam di bawah

Kecamatan Bengkong terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang masih belum optimal serta terus menciptakan inovasi-inovasi bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam agar tercipta pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat kota Batam

Terdapat beberapa titik di kecamatan di kota Batam sudah tersedia kegiatan Bank Sampah yang merupakan salah satu sarana yang di buat pemerintah kota Batam untuk penanggulangan sampah yang mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan sampah sudah dialihkan melalui tingkat Kecamatan yang sebelumnya dikelola oleh dinas terkait secara langsung. Ini akan memudahkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memulai dari diri sendiri dalam pemilahan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga masing-masing masyarakat yang menjadi sumber nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan hasil sampah masyarakat yang masih kurang optimal oleh pemerintah itu ditandai dengan masih sedikitnya jumlah kelompok-kelompok bank sampah di masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pola-pola yang terukur dalam setiap langkah kebijakan yang diambil agar memudahkan masyarakat untuk menjalankan setiap kebijakan. Namun apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah idealnya harus terorganisir dengan baik mulai dari pelaksanaan harus dilakukan kontrol agar dapat memberikan input dalam pelaksanaan kebijakan agar mendapatkan output yang baik dalam pemberian pelayanan publik untuk masyarakat, maka suatu kebijakan perlu dikelola sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Pengelolaan sampah yang langsung dilakukan oleh setiap kecamatan yang ada di Kota Batam telah berjalan hampir tiga tahun ini, dimulai sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang. Di Kecamatan Bengkong sendiri pengelolaan sampah sudah berjalan optimal. Namun demikian pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong sejatinya masih belum sempurna, di karenakan baru berjalan 3,5 tahun ini. Kebijakan pemerintah untuk memberikan ruang kepada setiap kecamatan yang ada di Kota Batam untuk mengatur sendiri pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing masih menghadapi kendala di lapangan, seperti tempat pembuangan sampah sementara yang masih belum dimiliki oleh setiap Kecamatan di Kota Batam karena keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan sampah merupakan persoalan yang pelik.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong tidak sepenuhnya kesalahan dari Pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan bersih masih rendah. Masyarakat seharusnya bisa mengoptimalkan hasil sampah rumah tangganya dengan memilah jenis sampah yang mempunyai nilai jual

ekonomis sebelum diletakkan di tong sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara oleh petugas. Adanya pembuangan sampah sementara yang disiapkan oleh pemerintah Kecamatan Bengkong sebagai fasilitas tempat pembuangan sampah masih menjadi dinamika sebagian warga. Sehingga masih terlihat beberapa tempat lokasi di Kecamatan Bengkong sampah berserakan di jalan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendapatkan outcome (keluaran) dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong, untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam khususnya Kecamatan Bengkong memerlukan bimbingan pemerintah.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong bisa dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang mendasar kepada masyarakat akan pentingnya memilah sampah sebelum di buang, karena sampah yang dihasilkan oleh pemilahan dari sampah rumah tangga mempunyai nilai jual ekonomis bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Pemanfaatan bank sampah di setiap RT/RW sangat berpengaruh untuk memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat yang ada di setiap Kecamatan dengan melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Pemerintah hendaknya terus mengoptimalkan peran masyarakat dalam mensukseskan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan memberikan informasi dan sosialisasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Diharapkan masyarakat akan sadar dengan sendirinya betapa pentingnya kebersihan dan pemanfaatan pengelolaan sampah yang baik. Masyarakat mengetahui bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan sejatinya kegunaannya untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Bengkong masih belum dilakukan dengan optimal oleh pemerintah Kota Batam. Meskipun penerapan 3R telah dibuat namun, masyarakat di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum memahami implementasi atau pelaksanaan 3R (*reuse, reduce, recycle*) menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah.

Mengimplementasikan kebijakan bukan semata-mata hanya memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, tetapi pemerintah perlu mengawasi jalannya

implementasi kebijakan. Masih rendahnya pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong ditunjukkan oleh belum berhasilnya pemerintah setempat mendapatkan hasil yang optimal dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Dengan dikelolanya sampah oleh Kecamatan secara langsung telah terjadi pengurangan tumpukan sampah di rumah-rumah warga, sehingga pengumpulan sampah lebih cepat dan terorganisir langsung dibawah kendali Camat. Namun demikian kecepatan kerja masih dihadapkan pada keterbatasan armada di setiap Kecamatan.

Pemerintah sebagai pelaksana implementasi kebijakan perlu memberikan informasi-informasi yang mudah diterima oleh masyarakat agar masyarakat paham dan ingin ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Memberikan informasi sangatlah penting untuk menjadikan masyarakat tahu betul nilai ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan sampah rumah tangga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Erwan Purwanto, S. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Publik, Edisi 1. Jakarta: Alfabeta.
- Apriadi, W. H. (1998). Memproses Sampah. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Boediono, B. (2003). Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Conyers, D. (1991). Perencanaan Sosial Dunia Ketiga. Yogyakarta: UGM Press.
- Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. California: Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanhuri, E. (2007). Sampah Indonesia. Bandung: Teknik Lingkungan ITB.
- Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadiwiyoto, S. (1983). Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.
- Irfan, I. M. (2000). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bandung: Sinar Grafika.
- Irfan, I. M. (2016). Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Istianto, B. (2011). Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mtra Wacana Media.
- Moleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riant, N. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riant, N. (2008). Public Policy: Teor Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumus Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, <etode Penelitian Kebijakan. Edisi Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riant, N. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan Edisi Ketiga. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.
- Slamet, J. S. (2009). Kesehatan Lingkungan Cetakan ke-8. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subarsono, A. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2016). Analisis Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Tangkilisan, H. N. (2003). Wacana Kebijakan Publik Indonesia. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Tjiptono, F. D. A. (1995). Total Quality Management. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahab, S. (2001). Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Batam, P. (2013). Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Batam: Pemko Batam.

Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Jakarta: Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis. Jakarta: Republik Indonesia.

Kemendagri. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 33 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Jakarta: Kemendagri.